

WADAFTAR PUSTAKA

A . Buku

- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. cet. 1, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta Pusat.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press: Jakarta.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2014, *Postur APBN Indonesia*, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Jakarta.
- H. Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit Qiara Media, Pasuruan.
- Isra, Saldi, 2019, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Triningsih, Anna, Zaka Firma Aditya dan Abdul Basid Fuadi, 2023, *Hukum Tata Negara: Sejarah, Teori dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia*. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej, 2023, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Safa'at, M. Ali. *Et. Al.., Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi)*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019.
- Sihombing, Eko Nam, 2018, *Hukum Kelembagaan Negara*. Pustaka Prima, Medan.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram.
- Mulyawan, Rahman, 2015, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Unpad Press, Bandung.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej, 2023, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, ed. 1, cet. 1, Rajagrafindo Persada, Depok.
- SA, Widiada Gunakaya dan Mas Putra Zeno, 2021, *Politik Hukum Pidana: Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP*. Setara Press, Malang.
- Tahir, Palmawati, 2023, *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Wajdi, Farid dan Suhrawardi K. Lubis, 2019, *Etika Profesi Hukum*. ed. 1, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

B . Undang-undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (LN. No. 22 Tahun 1999, TLN. No. 3809).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LN. No. 93 Tahun 2003, TLN. No. Tidak ada).

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN. No. 98 Tahun 2003, TLN. No. 4316).

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN. No. 104 Tahun 2004, TLN. No. 4421).

Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LN. No. 176 Tahun 2008, TLN. No. 4924).

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (LN. No. 51 Tahun 2008, TLN. 4836).

Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (LN. No. 166 Tahun 2008, TLN. No. 4916).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN. No. 8 Tahun 2011, TLN. No. 5189).

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN. No. 70 Tahun 2011, TLN. No. 5226).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. No. 82 Tahun 2011, TLN. No. 5234).

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (LN. No. 117 Tahun 2012, TLN. No. 5316).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN. No. 182 Tahun 2017, TLN. No. 6109).

Undang-Undang No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

C . Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Ketetapan MPR. No. III/MPR/1978 Tahun 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

Ketetapan MPR. No. III/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (LN. No. 10 Tahun 2020).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019.

D. Jurnal

Abadi, Songga Aurora dan Fitra Arsil, “*Mekanisme Penetapan Ambang Bats (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial dan Sistem Multipartai Sederhana di Indonesia.*” Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, Vol. 2, No. 1

Ansori, Luthfil, 2017, “*Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019.*” Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 1

Canaldhy, Rendy Sueztra, Suandi dan Umi Purwanti, 2023, “*Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat dengan Indonesia.*” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol. 13, No. 1

Hapsari, Yasinta Dyah Paramitha dan Retno Saraswati, 2023, “*Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak Terhadap Demokrasi di Indonesia.*” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 5, No. 1

Mausili, Dwi Rianisa, 2019, “*Anomali residential Threshold dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Reduksi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia.*” Bappenas Working Papers, Vol. II No. 1

Mustofa, Imron, 2016, “*Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah.*” Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 2

Cholidin Nasir, 2020, “*Judicial Review di Amerika Serikat, Jerman dan Indonesia.*” Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 1

Prayogo, R. Tony, 2016, “*Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.*” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 02

- Restiyani dan Isharyanto, 2020, "*Anomali Presidential Threshold dalam Sistem Presidensiil di Indonesia.*" *Res Publica*, Vol. 4, No. 3
- Setiawan, Adjie Hari, 2023, "*Politik Hukum Presidential Threshold 2% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.*" *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 2, No. 1
- Siregar, Praise Junta W.S., 2022, "*Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum.*" *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2, No. 2
- Kurniawan, Febriansyah dan Retno Sari Handayani, 2022, "*Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia.*" *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, Vol. 4, No. 2
- Lindawaty, Debora Sanur, 2019, "*Keberadaan Koalisi dan Oposisi dalam Kinerja DPR RI 2019-2024.*" *Parliamentary Review*, Vol. 1, No. 4
- Umagapi, Juniar Laraswanda, 2022, "*Wacana Penghapusan Presidential Threshold.*" *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XIV, No. 6
- Masyrofah, "*Arah Perubahan Sistem Pemilu dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi (Usulan Perubahan Sistem Pemilu dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi).*" *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2
- Peramesti, Ni Putu Depi Yulia dan Dedi Kusmana, 2018, "*Kepemimpinan Ideal Pada Era Generasi Milenial.*" *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 10, No. 1
- Prayogo, R. Tony, 2016, "*Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02
- Qais Al Qadri, 2023, "*Politik Hukum Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.*" *Jurnal Hukum Egalitaire*, Vol. 1, No. 1
- Restiyani dan Isharyanto, 2020, "*Anomali Presidential Threshold dalam Sistem Presidensiil di Indonesia.*" *Res Publica*, Vol. 4, No. 3
- Sheffer, Lior, *Et. Al.*, 2023, "*How Do Politicians Bargain? Evidence from Ultimatum Games with Legislators in Five Countries.*" *American Political Science Review*, Vol. 117, No. 4
- Sitepu, Badikenita, 2016, "*Analisis Anggaran Pemerintah (APBN dan APBN-P) dalam Perspektif Demokrasi Multipartai dan Koalisis.*" *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 17, No. 1

E . Internet

- Badan Pusat Statistik. "Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019", <https://www.bps.go.id/id/statistics->

- [table/1/MTU3MyMx/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-1955-2019.html](https://www.cnn.com/2019/05/15/politik/pemilu-legislatif-tahun-1955-2019.html),
CNN Indonesia. “MK Lagi-lagi Tolak Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden”, <https://www.indonesia.com/nasional/20230228130035-617-918815/mk-lagi-lagi-tolak-gugatan-ambang-batas-pencalonan-presiden>,
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Fraksi”, <https://www.dpr.go.id/tentang/fraksi>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Profil Pimpinan”, <https://www.dpr.go.id/anggota/index/akd/12>
- Dewan Perwakilan Rakyat. “Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu”, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/50>
- DPR RI. “Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, https://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200213-090312-9592.pdf
- DetikEdu. “Bilangan Desimal: Arti, Contoh dan Cara Menentukan Nilai”, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5726965/bilangan-desimal-arti-contoh-dan-cara-menentukan-nilai>
- Feri Amsari. “Perbedaan Pemilu Presiden Indonesia dengan Amerika Serikat”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pemilu-presiden-indonesia-dengan-amerika-serikat-lt5c5d387c3f30e/>
- Gerindra, “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”, https://gerindra.id/wp-content/uploads/2022/05/AD_ART-2020-REVISED_FULL_COLOR_WEB-1.pdf
- Kanal Pengetahuan FH UGM. “Promosi Doktor Fakultas Hukum UGM, Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.”, https://www.youtube.com/live/oKnwtrjidNs?si=eNOEC_552mYrSc-0
- Katadata Media Network. “*Parliamentary Threshold* dalam Pemilu di Indonesia (2009-2019)”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/18/apa-itu-parliamentary-threshold>
- Kompas.com, “MK Putus 21 Perkara Uji Materi Presidential Threshold dalam 5 Tahun, 17 Tak Diterima”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/25/17405191/mk-putus-21-perkara-uji-materi-presidential-threshold-dalam-5-tahun-17-tak?page=all>
- KBBI VI Daring, “Ambang Batas”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ambang%20batas>
- PDI Perjuangan, “Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019-2024”, <https://www.pdi-perjuangantabanid.id/ad-art-pdi-perjuangan>
- Oxford English Dictionary, “*Threshold*”, <https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=Threshold>,

F. KAMUS

Black, Henry Campbell, 1968, *Black's Law Dictionary Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. West Publishing Co., St. Paul, Minn.

KBBI VI Daring, “Deduksi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Deduksi>,

KBBI VI Daring, “Ambang Batas”,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ambang%20batas>

Oxford English Dictionary, “Threshold”,
<https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=Threshold>

